**BAB III**

**PROFIL KJKS BMT KOTA PADANG**

1. **Profil Program KJKS BMT Kota Padang**
2. **Latar Belakang**

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan masih merupakan salah satu program prioritas bagi pemerintah, termasuk pemerintah Kota Padang, dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang ada di Indonesia yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Ditetapkannya kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu program prioritas pembangunan di Indonesia, disebabkan besar dan luasnya dampak *multiflye*r yang dapat menimbulkan masalah kemiskinan dan pengangguran jika permasalahan ini dibiarkan tanpa adanya intervensi dari pemerintah dan *stakesholder* yang ada.

Menyadari berbagai dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat terjadinya kemiskinan ini, maka pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan keluarganya. Pendekatan penanggulangan kemiskinan seperti yang tertuang dalam dokumen SNPK (Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan) dilaksanakan melalui pendekatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin (*Community Base Approach*). Artinya, pelaksanaan program oleh pemerintah disesuaikan dengan permasalahan mendasar yang selama ini dihadapi oleh masyarakat miskin dalam menjalankan kehidupannya. Kebutuhan dasar dan pokok ini antara lain berupa kebutuhan untuk konsumsi, kesehatan, pendidikan, modal usaha/akses terhadap modal, rasa aman, lapangan kerja dan usaha, kebutuhan atas tanah/lahan usaha, tempat tinggal, kebutuhan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan lain-lain.

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, pemerintah pusat dan daerah, telah melaksanakan berbagai program Nangkis di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kota Padang. Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Kota Padang oleh pemerintah kota dan provinsi bersama *stakeholder* yang ada adalah Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kelurahan melalui Pembentukan KJKS BMT. Program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2010 yang lalu dan merupakan kelanjutan dari program Kredit Mikro Kelurahan yang dilaksanakan di 50 kelurahan sasaran tahuh 2008 dan 2009 yang lalu. KJKS BMT merupakan lembaga keuangan mikrodengan badan hukum koperasi yang pengelolaanya dilaksanakan dengan menggunakan sistim syari’ah atau pola bagi hasil. Hal ini sangat sesuai dengan kondisi sosial dan demografi masyarakat Kota Padang yang sebagian besar beragama Islam (96% penduduk kota Padang beragama Islam) yang hidup berazaskan *adat basandi sarak dan sarak basandi kitabullah*. **[[1]](#footnote-1)**

1. **Kronologis Pembentukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah**

Pembentukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah(KJKS) BMT Kelurahan Kota Padang, didasarkan kepada UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan Keputusan Menteri Negara Koperasi Nomor 91/Kep/UMKM/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan syariah. Pelaksanaan pembentukannya diawali dengan beberapa kali pertemuan/rapat di rumah dinas Wakil Walikota Padang (pada bulan November 2009). Pada pertemuan I, yang dipimpin secara lansung oleh Bapak Wakil Walikota Padang selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD Kota Padang) dihadiri Direktur Eksekutif Pinbuk Pusat dan Kepala Cabang BRI Syari’ah Kota Padang sebagai nara sumber serta Kepala Dinas BPM PK, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas DIPERTAHUTBUN, Bagian Hukum, dan lain lain. Masing masing Kepala SKPD yang hadir sebagai peserta rapat, juga melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan penaggulangan kemiskinan yang menjadi tanggung jawabnya. Pada pertemuan ini, narasumber dari Pinbuk Pusat mengekspos mengenai keberhasilan daerah kabupaten Agam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan (termasuk penyaluran KMK) melalui Lembaga Keuangan Mikro BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) yang pelaksanaannya telah dimulai sejak tahun 1998 yang lalu melalui 86 Unit BMT yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Agam bersama Pinbuk.

Bank BRI Syari’ah pada kesempatan tersebut, menyampaikan kesanggupannya untuk bekerja sama dengan pinbuk Pusat dan Pemko Padang dalam penumbuhan koperasi di Kota Padang dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. BRI juga menyanggupi akan memberikan bantuan teknis dalam pengembangan usaha yang dilakukan termasuk dalam pemberian pinjaman modal usaha sepanjang memenuhi persyaratan Bank Teknis yang ditetapkan. Pada pertemuan tersebut semua dinas, intansi, dan unit kerja yang hadir sepakat untuk membentuk LKM berbadan hukum dalam bentuk KJKS dalam rangka pelaksanaan penagggulangan kemiskinan di Kota Padang dan bersedia mengintegrasikan LKM yang belum berbadan hukum yang menjadi binaan mereka ke dalam KJKS yang dibentuk di 54 kelurahan sasaran.

Pada pertemuan/rapat koordinasi yang ke II di tempat yang sama, yang dihadiri oleh semua Camat (11 orang Camat) dengan ka BPM PK dan Ka Dinas Koperasi dan UMKM sebagai nara sumber, diinformasikan tentang kebijakan Pemerintah Kota Padang tentang Penanggulangan Kemiskinan, yang akan dilaksanakan melalui KJKS dan perlunya sokongan dari pemerintah kecamatan untuk menyukseskan Program yang akan dilaksanakan ini.

Hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan di rumah Dinas Wakil walikota Padang ini ditindak lanjuti oleh BPM PK Kota Padang dengan melaksanakan rapat koordinaasi sekaligus sosialisasi di Ruang Sidang Balai Kota Padang pada tanggal 10 Maret 2010, yang membicarakan tentang rencana pembentukan KJKS di 54 kelurahan sasaran di Kota Padang. Dalam acara ini diundang semua dinas dan instansi terkait yang tergabung dalam Tim TKPKD Kota Padang dan bertindak selaku narasumber dari Pinbuk Pusat (Bpk Asli Chan, direktur Eksekutif Pinbuk Pusat) dan dari Bank BRI Pusat. Rapat ini dilanjutkan dengan rapat-rapat koordinasi teknis dengan dinas terkait mengenai penyusunan protap pembentukan KJKS dan proposal pembentukan KJKS di 54 kelurahan sasaran. Realisasi kegiatan baru diselenggarakan setelah usulan anggaran yang diajukan oleh BPM PK untuk pembentukan KJKS BMT di 54 kelurahan sasaran disetujui oleh Tim Anggaran Pemko Padang dan DPRD Kota.

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembentukan Lembaga Keuangan Berbadan Hukum ini, telah ditandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama Penumbuhan KJKS BMT di 54 Kelurahan sasaran antara pemerintah Kota Padang dengan Pinbuk Pusat dan Bank BRI Syariah Pusat. Di samping itu, juga telah dikeluarkan Keputusan Walikota Padang nomor 15 tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui penumbuhan Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang merupakan salah satu acuan yang dipedomani dalam pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan KJKS BMT Kelurahan ke depan.[[2]](#footnote-2)

1. **Tujuan Pembentukan Koperasi Syariah**
   1. Tersedianya Lembaga Keuangan Mikro Kelurahan (LKM-BMT) dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang berbadan hukum di tiap kelurahan sebagai wadah koordinasi dan integrasi penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai salah satu Lembaga Ekonomi Masyarakat yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat Kelurahan dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya.
   2. Terintegrasinya berbagai Lembaga Ekonomi Masyarakat Kelurahan (Binaan Dinas Instansi Kota Padang) yang terdapat di Kelurahan ke dalam wadah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang dibentuk di masing-masing Kelurahan.
   3. Terwujudnya akselerasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang.
   4. Semakin berkurangnya kegiatan yang bersifat ribawi dan rentenir[[3]](#footnote-3)
2. **Dasar Hukum**
3. Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992, tentang perkoperasian.
4. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2005, tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
5. Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1995, tentang usaha kecil.
6. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1994, tentang persyaratan dan tata cara Pengesahan akta pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi.
7. PP RI No. 9 Tahun 1995, tentang Pelaksanaan Koperasi usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
8. PP RI No. 32 Tahun 1998, tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha kecil.
9. PP RI No. 33 Tahun 1998, tentang modal Penyertaan pada Koperasi.
10. Kepmen Koperasi dan UMKM No. 99 Tahun 1998, tentang barang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan barang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan Syariah Kemitraan.
11. Keputusan Menteri Koperasi dan UMKM No. 91 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
12. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM RI No 39 tahun 2007 tentang Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.[[4]](#footnote-4)
13. **Profil KJKS BMT Kelurahan Padang Besi**[[5]](#footnote-5)
14. **Latar Belakang**

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT didirikan pada tanggal 11 April 2010. KJKS BMT dibentuk dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin kerjasama BRI Syariah dengan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). KJKS BMT mengembangkan pola terpadu Kelompok Usaha Muamalat (POKUSMA) yang diintegrasikan dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) KJKS BMT yang mandiri, mengakar di tengah-tengah masyarakat dan berkelanjutan.

KJKS BMT Kelurahan Padang Besi termasuk salah KJKS BMT yang berdiri di tahap pertama bersama dengan 53 KJKS BMT Kelurahan lainnya. KJKS BMT Kelurahan Padang Besi berdiri tanggal 02 Juni 2010 dengan jumlah pendiri 23 orang dengan dana SIMPOKSUS berjumlah Rp. 29.000.000,-

1. **Maksud dan Tujuan**
2. Memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya golongan ekonomi kecil.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat.
4. Meningkatkan kesejahteraan serta posisi tawar anggota khususnya dan masyarakat umumnya melalui kegiatan ekonomi.
5. Mengembangkan usaha Lembaga Keuangan yang dimiliki oleh anggota dan masyarakat, terkelola baik, efisien dan sehat.
6. **Fungsi dan Peran** 
   1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi untuk meningkatkan keuntungan usaha ekonomi dan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan lingkungan kerja pada umumnya.
   2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas SDM anggota, sehingga lebih professional dan Islami yang nantinya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
   3. Mengembangkan kelompok-kelompok usaha anggota untuk peningkatan efisiensi.
   4. Membentuk jaringan usaha antar anggota dan antar BMT.
   5. Membentuk kepribadian dan akhlak Islami yang tangguh dalam menghadapi tantangan global.
7. **Visi dan Misi**

Visi :

Menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang mandiri, sehat kuat dan terbaik di Kota Padang dalam melayani pembiayaan usaha sektor ril anggotadan masyarakat sekitar menuju kehidupan yang adil,makmur,sejahtera material dan spiritual serta meningkatkan kualitas ibadah anggota sehingga mampu berperan sebagai khalifah Allah SWT.

Misi :

1. Menumbuhkembangkan pengusaha mikro kecil agar tangguh dan professional mengelola usahanya untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas SDM anggota, sehingga lebih professional dan islami yang nantinya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Menumbuhkembangkan Pusat Usaha Masyarakat yang di ikuti, di kelola oleh anggota sebagai wadah untuk jalinan silahturahmi,membangun sosio kultur, transaksi bisnis,kemitraan usaha,berbagi pengalaman,menuju kehidupan social ekonominya yang lebih baik.
4. Peningkatan penghimpun dana dari anggota dan calon anggota
5. Peningkatan pendapatan bersama anggota dan calon anggota
6. Membentuk kepribadian dan akhlak islami yang tangguh dalam menghadapi tantangan global.
7. **Pola Dasar Program dan Program Kerja**

##### Menetaskan dan mengembangkan usaha-usaha produktif untuk pengembangan ekonomi masyarakat bawah, melalui :

* 1. Penggalangan kesamaan persepsi di kelompok-kelompok masyarakat kecil, pengusaha kecil, dan pemerintah tentang pola pengembangan usaha kecil.
  2. Mendorong pendirian dan pengembangan BMT di akar rumput melalui jama’ah masjid, pondok pesantren, masyarakat desa miskin dan lain-lain.

1. Menetaskan pengusaha-pengusaha kecil bawah dan mengembangkan usaha-usaha kecil bawah.
2. Pengembangan sistem pemasaran, teknologi promosi dan system manajemen untuk menunjang usaha-usaha produktif anggota dan pengusaha kecil bawah.

Strategi

##### Integrasi, yaitu untuk memperkuat keterpaduan mekanisme kerja berdasarkan kesamaan tujuan dan target dari kelompok kerakyatan dan anggota yang sudah ada, dimana LKM berperan sebagai katalisator dari berbagai potensi masyarakat dalam pencapaian tujuan.

##### Institusionalisasi, yaitu dengan menumbuhkan dan memperkuat kelompok-kelompok masyarakat dan anggota.

##### Kekeluargaan dan kebersamaan, ini dipergunakan sebagai landasan pembangunan dari bawah (*bottom up*), sehingga berakar kuat atas dasar solidaritas anggota dan masyarakat kecil serta ditunjang perkembangannya melalui proses pembinaan.

##### Pengembangan SDM, yaitu setiap kebijakan dan kegiatan diarahkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

**Program Jangka Menengah**

1. Mengembangkan dan membina pengusaha kecil bawah sehingga memiliki pangsa pasar yang makin besar dalam sector pertanian, perdagangan, perindustrian dan jasa.
2. Mendorong kemampuan pengusaha kecil bawah dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi secara lebih cepat.
3. Mengembangkan agar BMT menjadi gerakan untuk mendorong pengembangan usaha kecil bawah.

Program Jangka Panjang

1. Menjadikan LKM sebagai lembaga yang berperan dalam pengembangan ekonomi masyarakat bawah yang dimiliki oleh masyarakat setempat, sehingga menjadi lembaga yang berkemampuan mengembangkan jaringan dengan lembaga-lembaga lain.
2. Menjadikan usaha kecil bawah sebagai sarana pemerataan asset nasional yang berkeadilan dan efektif dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
3. Menjadikan usaha kecil bawah sebagai kekuatan pembangunan struktur masyarakat pedesaan yang maju dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan Peranan usaha kecil bawah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi di berbagai tingkatan penentuan keputusan
5. **Pengurus KJKS – BMT Kelurahan Padang Besi**

Ketua : Alfakhruddin, S.Sos

Sekretaris : Bytom Miarti, SE

Bendahara : Rahmi Khamsyiah, SE

1. **Pengelola KJKS – BMT Kelurahan Padang Besi**

Manajer : Henny Novariola, SE

Pembukuan : Helsi Sartika, A.Md

1. **Profil KJKS BMT Kelurahan Cengkeh[[6]](#footnote-6)**
2. **Latar Belakang**

Kelurahan Cengkeh salah satu dari 15 kelurahan yang ada di Kecamatan Lubuk Begalung yang terletak di tengah Kota Padang. Kondisi masyarakat kelurahan cangkeh saat ini, jika dilihat dari persentase penduduk, masih banyak yang tergolong masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan dari pemerintah. Pembinaan dibutuhkan untuk semua sektor kehidupan masyarakat, baik bidang sosial, agama, politik, dan terutama sektor ekonomi yang masih membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah.

Keseriusan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan perkotaan khususnya yang berbasis kelurahan telah dibuktikan dengan meluncurkan berbagai program, antara lain program yang diprakarsai oleh Pemerintah Kota Padang melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan (BPMPK) yaitu program pengentasan kemiskinan melalui Program KJKS BMT yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* Kota Padang.

Tidak dipungkiri bahwa keberadaan Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah *Baitul Maal Wat Tamwil* (KJKS BMT ) Kota Padang Kelurahan Cengkeh Nan XX, sejauh ini telah memberikan dampak yang sangat positif bagi pengembangan perekonomian masyarakat khususnya. Dengan program ini diharapkan masalah yang muncul akibat dari lemahnya ekonomi masyarakat seperti meningkatnya pengganguran, bertambahnya anak putus sekolah karena faktor ekonomi, anak jalanan (pengamen), pemulung, copet, rampok, perkelahian antar pelajar atau kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Sebagian kondisi tersebut telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat. Hal ini harus dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Untuk itu keseriusan dari pemerintah dan kemauan masyarakat dan *stakeholder* yang terkait dengan pengentasan kemiskinan ini diharapkan dapat ditingkatkan.

1. **Visi dan Misi**
2. **Visi**

Menjadikan KJKS BMT Kelurahan Cengkeh Kota Padang sebagai sumber permodalan bagi pengembangan ekonomi sesuai dengan prinsip syari’ah dan pembinaan keagaamaan yang berkelanjutan bagi anggota.

1. **Misi**
2. Mengembangkan usaha masyarakat melalui pemberian permodalan dengan prinsip syari’ah dengan syarat yang mudah.
3. Menerapkan prinsip-prinsip syari’ah dalam kegiatan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi anggota.
4. Memberikan pembinaan yang berkesinambungan dalam rangka pengembangan usaha anggota khususnya usaha kecil maupun menengah.
5. Memberikan pembinaan keagamaan yang berkesinambungan terkait dengan perekonomian masyarakat.
6. **Maksud dan Tujuan**

Dalam pelaksanaan program dari pemerintah kota padang berupa pembentukan KJKS BMT Kota Padang sebenarnya diserahkan kepada masyarakat kelurahan itu sendiri, termasuk di dalamnya kelurahan Cangkeh Nan XX. KJKS BMT Kota Padang Kelurahan Cengkeh dibentuk dengan maksud:

1. Meningkatkan akses permodalan bagi anggota dan calon anggota dalam mengembangkan usaha dan perekonomian mereka dengan dilandaskan pada prinsip syari’ah.
2. Berupaya membantu pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang banyak menimbulkan masalah sosial di tengah masyarakat.
3. Mewujudkan gerakan pembebasan masyarakat khususnya anggota dan calon anggota dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan, dan ekonomi ribawi yang selama ini justru menyulitkan mereka.
4. Melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap seluruh anggota maupun calon anggota terkait dengan pengembangan usaha, agama, dan tata krama sosial yang sesuai dengan prinsip islam.
5. **Fungsi dan peran**

Keberadaan KJKS BMT Kota Padang Kelurahan Cengkeh diharapkan dapat memberi kontribusi yang penting bagi kelangsungan perekonomian anggota khususnya dan masyarakat kelurahan Cengkeh secara umum. Sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera secara ekonomi serta memiliki moralitas yang baik. Hal ini tidak terlepas dari visi dan misi yang ditetapkan oleh KJKS, namun secara khusus KJKS memiliki fungsi dan peran antara lain:

1. Menjadi sumber permodalan yang utama bagi anggota dalam mengembangkan usaha dan membebaskan anggota dari jeratan rentenir.
2. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi untuk meningkatkan keuntungan usaha ekonomi dan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan lingkungan kerja pada umumnya.
3. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas SDM anggota, sehingga lebih professional dan islami dalam mengelola kegiatan ekonomi guna mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.
4. Mengembangkan kelompok-kelompok usaha anggota dalam rangka memajukan usaha.
5. Membentuk jaringan usaha antar anggota dan antar BMT
6. Membentuk kepribadian anggota agar mampu bertindak dan berakhlak islami dalam setiap aktivitas yang dijalankan baik dalam bentuk kegiatan ekonomi maupun kegiatan lainnya.
7. **Pengurus**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama** | **Jabatan** | **Alamat** |
| Yul Asril, S.Sos | Ketua | Komp. Kehakiman Cengkeh RT 05/05 |
| H. Syafril Tanjung | Wakil Ketua | Komp. Kehakiman Cengkeh RT 03/05 |
| Hj. Triana Puspasari, M. Si | Sekretaris Umum | Komp. Kehakiman Cengkeh RT 05/05 |
| Syamsinar | Sekretaris | Asrama TNI-AD Cengkeh RT 03/03 |
| Darwin, S.Pd | Bendahara | Cengkeh No. 01 RT 02/04 |

1. **Pengawas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama** | **Jabatan** | **Alamat** |
| Yuliar, S.Sos., MM | Lurah Cangkeh | Komp. Ranah Minang Kel. Koto lalang Kec. Lubug Kilangan |
| Mukhlis, SH | Ketua LPM | Kel. Cengkeh RT 03/04 |
| H. Jonhar | Tokoh Masyarakat | Komp.Kehakiman RT 03/05 Cengkeh |
| Dra. Asniwati | Tokoh Masyarakat | Kel. Cengkeh RT 04/02 |

1. **Pengelola**

Seiring dengan pencairan dana, Pemerintah Kota Padang menyertakan dua orang pengelola yang telah terlebih dahulu dilatih dan bertugas mengelola dana tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan pemerintah yaitu pengentasan kemiskinan. Pengelola tersebut terdiri dari dua orang, yaitu: tenaga manajer dan tenaga pembukuan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama** | **Jabatan** | **Alamat** |
| Afriyanti, SHI | Manajer | Jl. Bentang PLTG Kel. Cpk Tangah Kec. Pauh |
| Vera Deswita, SE | Pembukuan | Jl. Dr. M. Hatta Unand Kel. Limau Manis Kec. Pauh |

1. **Keanggotaan**

Hingga saat ini KJKS BMT Cengkeh Nan XX berusaha untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menjadi anggota dan memaksimalkan pelayanan KJKS BMT Cengkeh Nan XX agar semakin dipercaya oleh masyarakat. Keanggotaan KJKS BMT Cengkeh Nan XX secara bertahap telah mengalami peningkatan. Saat ini tercatat 171 orang yang menjadi anggota dan 24 orang pendiri.

1. **Profil KJKS BMT Kelurahan Jati Baru[[7]](#footnote-7)**
2. **Sejarah Berdirinya**

Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayah Kota Padang, maka dibentuklah Program PKBK-MPK Kota Padang tahun 2010 dengan membangun kelembagaan Koperasi Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* (KJKS-BMT) di beberapa kelurahan di Kota Padang. Untuk Kelurahan Jati Baru, pada hari Sabtu tanggal 12 April 2010 didirikan koperasi yang dimaksud tersebut melalui Rapat Pembentukan Kepengurusan KJKS BMT Kelurahan Jati Baru.

1. **Visi dan Misi**

Visi KJKS BMT Kelurahan Jati Baru adalah meningkatkan kualitas ibadah anggota sehingga mampu berperan sebagai khalifah Allah SWT. Sedangkan misi KJKS BMT Kelurahan Jati Baru adalah:

* + 1. Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi.
    2. Memberdayakan usaha kecil.
    3. Membina kepedulian *aghnia’* kepada *dhuafa* secara terpola dan berkesinambungan.

Maksud dan tujuan dibentuknya KJKS BMT Kelurahan Jati Baru adalah :

* + 1. Meningkatkan akses permodalan bagi anggota dan calon anggota.
    2. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
    3. Mewujudkan gerakan pembebasan masyarakat khususnya anggota dan calon anggota dari belenggu rentenir, kemiskinan dan ekonomi ribawi.

Kriteria sasaran program KJKS BMT Kelurahan Jati Baru untuk pembiayaan adalah mengutamakan keluarga miskin dengan dana yang berasal dari berbagai sumber yang mengacu kepada ketentuan pengampu program dan/atau pemilik dana.

1. **Struktur Organisasi**

Untuk mengetahui bentuk bagan organisasi KJKS BMT Kelurahan Jati Baru dapat dilihat pada gambar.

# Bagan Struktur Organisasi KJKS BMT Kelurahan Jati Baru

**Pembina**

**Rapat** **Anggota**

**Manager**

**Pengurus**

**Dewan Pengawas Syariah**

**Teller**

**Pembiayaan**

**Pembukuan**

**Pengurus KJKS BMT Kelurahan Jati Baru**

1. Ketua : Drs. Duski Samad
2. Sekretaris : Desiyanti
3. Bendahara : Yurnizal, SE

**Pengawas KJKS BMT Kelurahan Jati Baru**

1. Djajat Sutarja
2. Soemarno
3. Maghdalena, SE

**Pengelola KJKS BMT Kelurahan Jati Baru**

1. Manajer : Arief Murdani, S.Ip
2. Pembukuan : Afrina Yesi, A.Md
3. **Kegiatan Usaha**

Kegiatan yang dikelola oleh KJKS BMT Kelurahan Jati Baru adalah melakukan penghimpunan dana dari anggota koperasi serta menyalurkan pembiayaan. Bentuk-bentuk penghimpunan dana pada KJKS BMT Kelurahan Jati Baru adalah :

* + 1. Simpanan pokok khusus, simpanan pokok dan simpanan wajib.
    2. SWP (Simpanan Wajib Pembiayaan).
    3. Tamara (Tabungan Mandiri Sejahtera).

Bentuk-bentuk pembiayaan yang disediakan adalah :

1. Pembiayaan *mudharabah*.
2. Piutang *murabahah*.
3. *Qardh*.
4. *Ar rahn*.

1. Diolah dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan KJKS BMT Kota Padang 2011, h. 1-3 [↑](#footnote-ref-1)
2. Diolah dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan KJKS BMT Kota Padang 2011, h. 9-11 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid.*, h. 4 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*., h. 5-6 [↑](#footnote-ref-4)
5. Diolah dari Profil KJKS BMT Kelurahan Padang Besi [↑](#footnote-ref-5)
6. Diolah dari Profil KJKS BMT Kelurahan Cengkeh [↑](#footnote-ref-6)
7. Diolah dari Profil KJKS BMT Kelurahan Jati Baru [↑](#footnote-ref-7)